



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANDATANGANAN MINUTA
DAN SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS
MELALUI NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

FAUSTINE KARTIKA MARSHA

NPM 221003742019706

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANDATANGANAN MINUTA DAN SALINAN AKTA
PERNYATA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
FAUSTINE KARTIKA MARSHA
NPM : 221003742019706

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

DR. HADI KARYONO, SH, MHUM
NUPTK : 7034742643130083

Anggota,

JUHARI, SH, MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perbedaan Minuta Akta dan Salinan Akta Otentik Notaris	9
B. Kewajiban dan Kewenangan Notaris perihal Minuta Akta dan Salinan Akta 12	
C. Pengertian RUPS Pada Perseroan Terbatas	14
D. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	16
E. Tanda tangan Elektronik atau Digital Beserta Syarat Keabsahannya.....	17
F. Tanda tangan Elektronik Berdasarkan Kewenangan Notaris	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Metode Penyajian Data	27
F. Metode Analisa Data	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Ketentuan Regulasi Hukum Terhadap Penandatanganan Minuta Dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Secara Elektronik Melalui Notaris di Indonesia	29
B. Implikasi Atas Minuta Dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Yang Ditanda Tangan Secara Elektronik Melalui Notaris Di Indonesia	39
C. Upaya Hukum Dan Regulasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memastikan Kepastian Hukum Penandatanganan Minuta Akta Dan Salinan Pernyataan keputusan RUPS Secara Elektronik.....	43
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Seringkali para pemegang saham PT membutuhkan waktu yang singkat untuk memutuskan suatu perubahan anggaran dasar perseroan yang kemudian dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada, para pemegang saham lebih memilih melakukan RUPS secara elektronik yakni melalui media telekonferensi yang lebih cepat dan praktis. RUPS dengan cara elektronik memang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), namun pada praktiknya masih sering terdapat perdebatan, terutama ketika akan dituangkan ke dalam minuta dan salinan akta notaris. Selama ini, pembuatan minuta dan salinan akta masih harus mengikuti syarat dan tata cara Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014), sehingga notaris dituntut untuk bekerja sesuai dengan asas *'tabellionis officium fideliter exercebo'* yakni notaris harus bekerja secara tradisional dengan melihat, mendengar, dan hadir untuk menjaga kebenaran formil dan keaslian dokumen dihadapan para pemohon. Karena adanya ketidaksesuaian antara regulasi tersebut, dilakukan penelitian tinjauan yuridis terhadap regulasi hukum yang menyangkut dengan penandatanganan minuta dan salinan akta pernyataan RUPS elektronik, serta menemukan implikasi atau akibat yang dapat timbul atas tindakan tersebut untuk dapat ditelaah upaya hukum dalam memastikan kepastian dan keabsahan hukum atas minuta akta dan salinan pernyataan keputusan RUPS secara elektronik. Metode penelitian yang dilakukan untuk dapat membantu menelaah dalam kasus tersebut adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yakni menemukan fakta-fakta hukum lalu mengkaji secara menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemui fakta bahwa walaupun RUPS elektronik dapat memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 1 Tahun 2024), tapi pelaksanaan tanda tangan minuta dan salinan akta pernyataan RUPS yang merupakan akta partij tetap harus mengikuti aturan dari UUJN. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada upaya untuk dapat memperbaharui UUJN, mengingat instrumen kerja dari instansi yang berhubungan dengan Notaris sudah melakukan transformasi digital (Ditjen AHU), terutama terdapat contoh studi dari Uni Eropa yang sudah mencoba digitalisasi pada informasi dan transaksi notaris.

Kata kunci : *RUPS Elektronik, asas 'tabellionis officium fideliter exercebo'*,

Minuta Akta, Salinan Akta, Akta Partij